

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partai Aceh (PA) menjadi partai politik lokal yang langsung meraih kemenangan saat pertama kali berkontestasi dalam Pemilihan Legislatif di Provinsi Aceh, hal tersebut menjadi suatu fenomena, dimana Partai Lokal yang baru dibentuk secara logis belum memiliki cukup sumber daya untuk memenangkan kontestasi baik dari segi anggaran, jumlah kader/simpatian maupun taktik/strategi politik yang digunakan.

PA merupakan partai politik lokal yang berdiri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan ruang bagi lahirnya partai lokal sebagai bagian dari implementasi kesepakatan MoU Helsinki. Sebagai partai lokal, PA dibentuk oleh eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tujuan memperjuangkan kepentingan politik masyarakat Aceh dalam sistem demokrasi Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007). Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah lembaga legislatif tingkat provinsi yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, dengan jumlah kursi lebih besar dibanding DPRD provinsi lain yakni 1¼ kali lipat sesuai ketentuan Undang-Undang Pemerintah Aceh (Pasal 22 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006).

Kemenangan PA pada Pemilu 2009 tidak hanya dapat dijelaskan melalui popularitas eks-GAM dan dukungan jaringan KPA, tetapi juga dikaitkan dengan

sejumlah faktor lain dalam proses elektoral. Barter (2011, p. 125) menyebut bahwa dukungan terhadap PA sebagian berkaitan dengan organisasi KPA, intimidasi, dan politik uang. Barter juga mencatat beberapa laporan intimidasi, antara lain terhadap relawan partai lain dan kandidat dari partai lokal kecil. Temuan serupa juga dapat dibaca dalam laporan International Crisis Group (2012, pp. 6–9), yang menggambarkan ketegangan politik, intimidasi, dan potensi kekerasan elektoral sebagai bagian dari dinamika politik Aceh menjelang Pilgub 2012.

Dalam konteks Pilgub Aceh 2012, ketegangan politik kembali meningkat setelah munculnya perpecahan di antara tokoh eks-GAM, terutama ketika Irwandi Yusuf tidak lagi berada dalam barisan politik PA dan maju kembali sebagai calon gubernur melalui jalur independen. International Crisis Group (2012, p. 6) mencatat adanya ketegangan, intimidasi, dan potensi kekerasan elektoral dalam proses politik tersebut. Laporan tersebut juga menyebut bahwa narasi mengenai keberlanjutan perdamaian Aceh turut digunakan dalam kontestasi politik, termasuk munculnya pandangan bahwa kekalahan PA dapat berdampak terhadap stabilitas politik Aceh. Pandangan serupa juga ditemukan dalam penelitian Nurhasim (2016, p. 35).

Selain itu, pada Pileg 2014 di Kab. Aceh Jaya ditemukan adanya strategi unik yang dilakukan oleh PA, dimana PA melibatkan masyarakat dalam mengusulkan caleg dari setiap Desa yang nantinya akan diseleksi oleh pengurus partai di tingkat Kecamatan bersama tokoh agama, adat, pemuda, wanita dan

Kepala Desa. Selain itu, juga terdapat strategi lainnya yang dilakukan oleh PA yaitu dengan menawarkan program Malem Dagang (Program berbasis agama) untuk mendapatkan dukungan politik dari para ulama dan pimpinan pesantren (Ayunanda & Maimun, 2018).

Di wilayah yang berbeda, PA Kab. Subulussalam pada Pileg 2014 memiliki strategi tersendiri dalam menarik simpati masyarakat yaitu dengan janji untuk menyejahterakan keluarga mantan kombatan GAM, memanfaatkan tokoh GAM di setiap dapil untuk melakukan kampanye, menggerakkan kelompok-kelompok yang telah terafiliasi dengan PA antara lain Forum Pemuda Aceh, Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh, Komisi Peralihan Aceh, Serikat Pekerja Aceh serta Kelompok Ibu-ibu pengajian (Bahryansyah, 2016).

Beberapa strategi yang digunakan oleh PA tersebut, menggambarkan perbedaan antara PA dengan Partai Nasional maupun Partai Lokal lainnya yang biasanya menggunakan strategi persuasif. Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui apakah PA juga melakukan teknik/taktik umum yang ada dalam Teori Partai Politik atau justru PA lebih cenderung menggunakan teknik-teknik penggalangan dalam Teori Penggalangan Intelijen dengan melakukan propaganda dan lain sebagainya.

Secara historis, munculnya PA karena Provinsi Aceh merupakan salah satu di antara 5 Provinsi lainnya di Indonesia yang mendapatkan sebutan sebagai wilayah Otonomi Khusus maupun Daerah Istimewa, dimana sejak tahun 1959 Provinsi Aceh telah ditetapkan sebagai Daerah Istimewa di bidang agama,

peradatan dan pendidikan, pada tahun 2002 Pemerintah Pusat kembali memberikan hak otonomi khusus kepada Provinsi Aceh yang masih berlaku sampai saat ini. Pemberian Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh tersebut merupakan salah satu strategi Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang dilakukan oleh kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di wilayah Provinsi Aceh, meskipun kenyataannya pemberian Otonomi Khusus pada masa itu juga tidak membuat GAM melakukan gencatan senjata.

Penyelesaian konflik di Provinsi Aceh justru dapat diwujudkan pasca bencana Tsunami besar yang terjadi pada Desember 2004 sehingga Pemerintah RI dengan GAM sepakat untuk mengakhiri konflik dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Helsinki, Finlandia. Salah satu isi dalam MoU tersebut adalah kesepakatan agar Aceh memiliki Pemerintah Daerah yang otonom sehingga disahkanlah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang salah satunya juga mencantumkan kemunculan partai politik lokal di Provinsi Aceh. Aturan tentang Partai Politik di Aceh juga telah diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Partai Politik, secara teoritis, adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda (Budiardjo, 2008, p. 404). Sementara itu, Partai Politik Lokal dalam PP No. 20 Tahun 2007 didefinisikan

sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Dengan adanya aturan yang memperbolehkan berdirinya partai lokal, sejak Pemilu 2009 partai-partai lokal Aceh mulai ikut serta dalam kontestasi pemilu di Indonesia, meskipun ruang lingkupnya terbatas di Provinsi Aceh. Pada Pemilu 2009, terdapat enam partai politik lokal Aceh yang berkontestasi, yaitu Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2009). Sementara itu, pada Pemilu 2014, terdapat tiga partai lokal yang berkontestasi, yaitu Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Damai Aceh (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2014). Pada Pemilu 2019, terdapat empat partai lokal yang berkontestasi, yaitu Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Daerah Aceh, dan Partai SIRA (Kompas, 2018). Pada Pemilu 2024, KPU menetapkan enam partai politik lokal Aceh sebagai peserta pemilu untuk DPRA dan DPRK, yaitu Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Darul Aceh (PDA), Partai SIRA, Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh), dan Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) (Sekretariat Kabinet RI, 2022).

Dari beberapa Pemilu yang telah diikuti oleh Partai Lokal di Aceh hanya PA yang sejak tahun 2009 terus konsisten ikut serta dalam Pemilu. Selain itu, sejak ikut serta dalam Pemilu, PA juga langsung bisa mengalahkan perolehan jumlah kursi dari Partai-partai Politik Nasional sehingga dapat dikatakan bahwa PA selalu mendominasi jumlah kursi DPRD Provinsi yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sejak 2009 hingga 2019, bahkan pada Pemilu 2024 PA juga kembali mendominasi jumlah perolehan kursi di DPRA.

Adapun Partai Politik dengan perolehan kursi DPRA terbanyak Pada Pemilu 2009 di antaranya Partai Aceh yang mendapatkan 33 kursi, Demokrat 10 kursi, Golkar 8 kursi, PAN 5 kursi dan PKS 4 kursi (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2009). Selanjutnya, pada Pemilu 2014, Partai Aceh mendapatkan 29 kursi, Golkar 9 kursi, Demokrat 8 kursi, NasDem 8 kursi, dan PAN 7 kursi (Serambi Indonesia, 2014). Meskipun kursi PA menurun dibandingkan Pemilu 2009, PA tetap menjadi partai dominan di DPRA ketika jumlah kursi DPRA bertambah dari 69 menjadi 81 kursi (Keumala, 2018). Kemudian, pada Pemilu 2019, Partai Aceh memperoleh 18 kursi dan tetap menjadi partai dengan kursi terbanyak di DPRA periode 2019–2024 (Aminah, 2019). Terakhir, pada Pemilu 2024, PA kembali menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRA, yaitu 20 kursi, disusul NasDem 10 kursi, PKB 9 kursi, Golkar 9 kursi, dan Partai Demokrat 7 kursi (Gayo, 2024).

Menurut data perolehan kursi tersebut, Partai Aceh terus mendominasi jumlah peroleh kursi di DPRA serta dapat langsung mengalahkan Partai-partai

Nasional sejak pertama kali ikut dalam Pemilu pada 2009 meskipun perolehan kursinya fluktuatif, menurun pada Pemilu 2014 - Pemilu 2019 dan kembali meningkat pada Pemilu 2024. Berkaitan dengan dominasi, menurut Weber (1978, p. 121) dominasi adalah pihak yang memiliki wewenang sah untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku sehingga pihak yang dikuasai wajib menaati kehendak penguasa. Selain itu, dominasi juga memerlukan keabsahan (*legitimacy*) yang mana dominasi harus diakui oleh masyarakat sehingga penguasa dapat melaksanakan kekuasaannya secara sah (Sunarto, 2004, p. 74).

Fenomena dominasi Partai Aceh tersebut menunjukkan pentingnya strategi dalam kontestasi politik elektoral. Strategi dapat dipahami sebagai rencana berskala besar yang berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan guna mencapai tujuan tertentu (Pearce & Robinson, 2008, p. 2). Dalam konteks politik, strategi menjadi instrumen penting bagi partai untuk membangun dukungan, mempertahankan basis massa, serta memenangkan persaingan elektoral.

Sementara itu, strategi Politik merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak dapat diwujudkan. Untuk mencapai cita-cita politik yang dimaksud, Peter Schröder membagi strategi politik ke dalam tiga bagian; strategi *ofensif* (menyerang), strategi *defensif* (bertahan) dan juga strategi *positioning* (Schröder, 2009).

Penulis telah melakukan *review* tentang penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang Partai Aceh khususnya terkait strategi kemenangan dalam memperoleh suara/kursi. Dari hasil *review* tersebut, mayoritas penelitian terdahulu melihat dari sisi penurunan jumlah kursi partai Aceh, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana Partai Aceh tetap mendominasi jumlah kursi dalam 4 edisi Pemilu terakhir meskipun perolehan kursinya menurun. Beberapa lokus penelitian terdahulu juga lebih terfokus kepada strategi Partai Aceh di tingkat Kabupaten/Kota, namun dalam penelitian ini lokus yang diambil adalah tingkat Provinsi atau lebih tepatnya tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Memang terdapat beberapa penelitian terdahulu yang lokusnya di tingkat Provinsi namun tidak berfokus pada dominasi jumlah kursi, melainkan melihat hubungan Partai Aceh dengan Psikologi, MoU Helsinki dan persaingan antar partai lokal.

Selain itu, mayoritas teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu meliputi Teori Strategi Politik, Marketing Politik, Komunikasi Politik, Psikologi Politik dan Citra Politik. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tambahan yaitu Teori Penggalangan Intelijen. Menurut Saronto (2018), penggalangan intelijen merupakan metode atau aktivitas untuk memengaruhi emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi target agar bersedia mengikuti kehendak penggalang.

Dengan beberapa pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini berjudul Analisis Strategi Partai Eks Kombatan GAM dalam

Mendominasi Perolehan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada 4 Edisi Pemilu (2009, 2014, 2019, 2024). Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif sehingga dapat menggambarkan secara utuh dan rinci berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, sedangkan data yang dikumpulkan berupa data Primer (Wawancara dan observasi) dan data Sekunder (dokumen, penelitian terdahulu, laporan pemerintah dan lain sebagainya). Penentuan informan dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* sehingga data yang didapatkan berasal dari informan-informan yang memiliki wewenang langsung dalam menentukan strategi yang dilakukan Partai Aceh dalam mendominasi jumlah perolehan kursi di DPRA.

1.2. Rumusan Masalah

Partai Aceh (PA) merupakan salah satu Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh yang secara historis dan struktural didominasi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari eks-kombatan GAM, baik sebagai pendiri maupun sebagai penggerak utama dalam aktivitas politik lokal. PA pertama kali ikut serta dalam kontestasi Pemilu pada tahun 2009 dan langsung memperoleh jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan mengalahkan perolehan kursi Partai-partai Nasional yang notabene memiliki pengalaman, strategi, basis massa dan kader yang lebih berpengalaman dibandingkan PA. Tren positif PA tersebut juga berlanjut pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024 dimana PA tetap mendominasi jumlah perolehan kursi di DPRA. Fenomena dominasi Partai Aceh tersebut memunculkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi politik yang dijalankan Partai Aceh sebagai partai eks-kombatan GAM dalam mendominasi perolehan kursi DPRA pada empat edisi Pemilu (2009, 2014, 2019, dan 2024)?
2. Teknik pengaruh apa saja yang digunakan Partai Aceh untuk memperoleh kepercayaan, simpati, dan dukungan masyarakat Aceh, serta bagaimana pola pergeserannya dari waktu ke waktu?
3. Bagaimana perbandingan efektivitas strategi politik formal dengan teknik penggalangan intelijen dalam menjelaskan dominasi Partai Aceh di DPRA, dan sejauh mana kedua pendekatan ini saling melengkapi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi politik yang dijalankan Partai Aceh dalam mendominasi perolehan kursi DPRA selama empat periode Pemilu (2009–2024).
2. Mengidentifikasi teknik pengaruh dan metode penggalangan yang digunakan Partai Aceh untuk membangun dukungan masyarakat, termasuk perubahan pola penggalangan persuasif dan koersif dalam empat edisi Pemilu.
3. Menganalisis perbandingan efektivitas strategi politik formal dan teknik penggalangan intelijen dalam menjelaskan dominasi Partai Aceh, serta menilai relevansinya bagi pengembangan teori politik dan dinamika pascakonflik di Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pengembang teori dan ilmu pengetahuan, hasil studi ini diharapkan dapat memperdalam ruang lingkup pembahasan dan pengembangan pengetahuan juga wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan strategi Partai Aceh serta teknik-teknik penggalangan yang diterapkan untuk memperoleh simpati masyarakat sehingga dapat mendominasi perolehan kursi DPRA pada 4 edisi Pemilu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang politik khususnya terkait Partai Politik Lokal, serta memperkaya kajian tentang integrasi teori penggalangan intelijen dalam studi politik pascakonflik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi bagi Partai Aceh, Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal lainnya dalam menentukan strategi kemenangan yang akan digunakan pada kontestasi Pemilu selanjutnya di Provinsi Aceh.
- b. Sebagai referensi masyarakat Aceh untuk mengetahui strategi dan teknik penggalangan yang digunakan Partai Aceh untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat memilih Partai Aceh.

1.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu / Keaslian Penelitian

Partai Aceh merupakan salah satu Partai Lokal di Indonesia yang mayoritas diisi oleh kader dari golongan eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Cikal bakal kekuatan Partai Aceh telah terlihat bahkan sebelum Partai Aceh terbentuk, dimana tokoh eks-GAM seperti Irwandi Yusuf langsung menang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Aceh 2007 meskipun melalui jalur independen. Kemenangan Irwandi Yusuf dalam Pilgub 2007 tersebut disebabkan karena keinginan masyarakat untuk menjaga perdamaian di Aceh serta kekecewaan terhadap partai-partai nasional (International Crisis Group, 2007, p. 11).

Transformasi GAM menjadi kekuatan politik lokal tidak lepas dari momen penting dalam sejarah Aceh, yaitu penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005 sebagai hasil dari proses perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Kesepakatan tersebut menjadi titik awal integrasi eks-kombatan ke dalam sistem politik formal, termasuk melalui pembentukan Partai Aceh sebagai kendaraan politik utama eks-GAM pascakonflik (Stange & Patock, 2010). Di sisi lain, bencana tsunami Aceh 2004 menjadi salah satu faktor pemercepat proses perdamaian tersebut karena menciptakan tekanan moral dan diplomatik yang mempertemukan kepentingan kedua pihak dalam kerangka *disaster diplomacy* (Mudjiharto, 2020).

Eks-kombatan GAM secara konsisten menjaga konsolidasi dan loyalitas basis massanya melalui sejumlah aktivitas simbolik dan kultural. Peringatan tahunan seperti Milad GAM setiap 4 Desember, Haul Hasan Tiro serta peringatan

tsunami Aceh dijadikan sebagai ajang pemersatu serta sebagai pengingat atas perjuangan masa lalu, sekaligus sarana memperkuat legitimasi politik eks-kombatan di mata masyarakat Aceh serta turut digunakan sebagai medium penggalangan dukungan politik. Partai Aceh bukan hanya mengandalkan struktur formal partai, tetapi juga memanfaatkan jaringan emosional dan historis yang mengakar kuat dalam masyarakat Aceh pascakonflik (Yusuf, Maimun, Sanusi, & Jamil, 2020).

Dalam kajian tentang Partai Aceh pada fase awal pascaperdamaian, Barter (2011, p. 125) menjelaskan bahwa kemenangan Partai Aceh pada Pileg 2009 tidak hanya berkaitan dengan popularitas eks-GAM dan dukungan jaringan KPA, tetapi juga dikaitkan dengan sejumlah faktor lain dalam proses elektoral, termasuk intimidasi dan politik uang. Sementara itu, International Crisis Group (2012, p. 6) mencatat bahwa Pilgub Aceh 2012 berlangsung dalam situasi politik yang tegang setelah munculnya perpecahan di antara tokoh eks-GAM, terutama ketika Irwandi Yusuf tidak lagi berada dalam barisan politik Partai Aceh dan maju kembali melalui jalur independen. Laporan tersebut juga menyebut bahwa narasi keberlanjutan perdamaian turut digunakan dalam kontestasi politik Aceh, termasuk munculnya pandangan bahwa kekalahan Partai Aceh dapat berdampak terhadap stabilitas politik Aceh. Pandangan serupa juga ditemukan dalam penelitian Nurhasim (2016, p. 35). Ketiga sumber tersebut menunjukkan bahwa fase awal dominasi Partai Aceh tidak hanya dapat dipahami melalui strategi elektoral formal, tetapi juga melalui dinamika kekuasaan, jaringan eks-kombatan, dan pengaruh psikologis dalam politik lokal Aceh.

Pasca Pilgub Aceh 2012 yang dimenangkan oleh pasangan calon dari PA (Zaini Abdullah - Muzakir Manaf), strategi intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh PA perlahan mulai dihilangkan, dimana pada Pemilu 2014 PA mulai mengikuti strategi yang biasanya dilakukan oleh Partai Nasional lainnya, namun masih menggunakan branding ketokohan dari eks-Kombatan GAM. Dalam kontestasi Pileg 2014 di Kab. Simeulue, PA mengusung strategi yang lebih persuasif, beberapa strategi yang dilakukan di antaranya memanfaatkan isu caleg partai lain yang tidak menepati janji politiknya serta memasifkan branding positif eks-kombatan GAM di Kab. Simeulue yang notabene bukan merupakan wilayah basis GAM (Efendi, 2017).

Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Aceh Jaya, Partai Aceh menerapkan strategi yang berbeda dibandingkan partai lain. Mereka membuka ruang partisipasi masyarakat dengan melibatkan warga dalam proses pengusulan calon legislatif di tingkat desa. Nama-nama calon tersebut kemudian diseleksi oleh pengurus partai di tingkat kecamatan bersama dengan tokoh agama, adat, pemuda, perempuan, dan kepala desa. Selain itu, PA juga memperkenalkan program berbasis keagamaan yang dikenal dengan Malem Dagang, yang dimaksudkan untuk memperoleh dukungan politik dari kalangan ulama dan pimpinan pesantren (Ayunanda & Maimun, 2018).

Pasca Pemilu 2014, ketegangan politik antara Partai Aceh (Muzakir Manaf) dengan Partai Nanggroe Aceh (Irwandi Yusuf) kembali terjadi pada Pilgub Aceh 2017. Kedua partai memiliki kekuatan yang hampir sama dimana PA memiliki

basis massa di tingkat akar rumput dan massa militan (eks-kombatan), sedangkan Partai Nanggroe Aceh memiliki basis massa dari kalangan sipil GAM di samping juga memiliki basis massa di akar rumput (eks-kombatan). Strategi yang dilakukan oleh masing-masing partai lokal secara umum juga sama yaitu dengan menjadikan tokoh agama sebagai modal simbolik untuk mendulang suara dalam pemilu. Selain itu, strategi pemilu setiap kelompok GAM adalah dengan menggunakan sumber daya akar rumput, menggunakan simbol agama, simbol aceh, nasionalisme aceh, ideologi, dan membangun afiliasi dengan partai politik Nasional (Saputra et al., 2022).

Selain memiliki massa dari eks-kombatan GAM, Partai Aceh juga membangun sayap partai dari kalangan muda yang dinamakan Muda Seudang. Beberapa strategi yang dilakukan Muda Seudang dalam menaikkan elektabilitas Partai Aceh di antaranya memanfaatkan kampanye melalui platform media sosial (Facebook dan Instagram), memetakan segmentasi pemilih sesuai sebaran wilayah, memasifkan rekrutmen kader dan mengadakan sekolah politik (Khatami et al., 2023).

Partai Aceh juga memiliki Majelis Kehormatan yang dinamakan Tuha Peut yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh Partai Aceh, namun seiring dengan perkembangannya, Majelis Tuha Peut tidak lagi dominan dikarenakan Ketua Tuha Peut merangkap jabatan sebagai Wali Nanggroe, hal tersebut membuat jarak antara Partai Aceh

dan Ketua Majelis Tuha Peut karena tugas Kepartaian dengan Lembaga Wali Nanggroe memiliki peran dan fungsi yang berbeda (Syahri, 2018).

Mayoritas penelitian penelitian terdahulu melihat dari sudut pandang penurunan jumlah kursi partai Aceh, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana Partai Aceh tetap mendominasi jumlah kursi dalam 4 edisi Pemilu terakhir meskipun perolehan kursinya menurun. Beberapa lokus penelitian terdahulu juga lebih terfokus kepada strategi Partai Aceh di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, namun dalam penelitian ini lokus yang diambil adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Memang terdapat beberapa penelitian terdahulu yang lokusnya di tingkat Provinsi namun tidak berfokus pada dominasi jumlah kursi, melainkan melihat hubungan Partai Aceh dengan Psikologi, MoU Helsinki dan persaingan antar partai lokal.

Selain itu, terdapat beberapa teori yang banyak digunakan dalam penelitian terdahulu seperti Teori Strategi Politik, Marketing Politik, Komunikasi Politik, Psikologi Politik, dan Citra Politik. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini membandingkan Teori Strategi Politik dengan Teori Penggalangan Intelijen untuk melihat bagaimana strategi politik formal dan teknik pengaruh sosial-psikologis dapat menjelaskan dominasi Partai Aceh dalam perolehan kursi di DPRA. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini berjudul “Analisis Strategi Partai Eks Kombatan GAM dalam Mendominasi Perolehan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 4 Edisi Pemilu (2009, 2014, 2019, 2024).”

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berawal dari fenomena dominasi Partai Aceh (PA) dalam kontestasi Pemilu legislatif di tingkat provinsi sejak tahun 2009 hingga 2024. Pada Pemilu 2009, PA yang baru berdiri langsung meraih kemenangan besar dan menempati kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan karena secara umum partai politik yang baru terbentuk belum memiliki sumber daya finansial, kaderisasi, maupun basis massa yang kuat. Akan tetapi, PA mampu mengungguli partai-partai nasional yang telah mapan. Fakta tersebut menjadi titik awal perumusan masalah mengenai faktor dan strategi apa yang membuat PA dapat mendominasi perolehan kursi DPRA dalam empat edisi Pemilu terakhir.

Dominasi PA tidak terlepas dari latar belakang pendirinya yang berasal dari eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Latar belakang historis ini memunculkan simbol, narasi, serta modal sosial yang berbeda dibanding partai lainnya. Dalam perjalanannya, PA diketahui menggunakan berbagai strategi, baik yang bersifat koersif seperti intimidasi dan ancaman pada awal Pemilu 2009 dan Pilgub 2012, maupun strategi persuasif yang lebih halus seperti rekrutmen caleg berbasis desa, program keagamaan, hingga pembentukan sayap partai muda dan perempuan pada periode berikutnya. Perubahan strategi ini memperlihatkan adanya dinamika yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teoretis. Pertama, Teori Strategi Politik (Schröder, 2003, 2009), yang

menjelaskan bagaimana partai politik menyusun rencana ofensif, defensif, dan *positioning* guna memenangkan kontestasi elektoral. Kedua, Teori Penggalangan Intelijen (Saronto, 2018; Sukarno, 2011), yang memaparkan metode mempengaruhi emosi, sikap, perilaku, opini, dan motivasi (ESTOM) masyarakat melalui teknik propaganda, persuasi, maupun taktik lain yang biasa digunakan dalam operasi pengaruh. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi strategi apa saja yang digunakan PA serta menilai sejauh mana teknik politik formal berpadu dengan pendekatan penggalangan intelijen.

Kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Latar belakang historis konflik dan perdamaian di Aceh menciptakan konteks unik bagi lahirnya Partai Aceh. Fenomena kemenangan PA yang berulang dalam empat edisi Pemilu memunculkan rumusan masalah terkait faktor dominasi dan strategi yang digunakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengkaji strategi PA menggunakan dua pisau analisis, yakni teori strategi politik dan teori penggalangan intelijen. Temuan penelitian dari data lapangan maupun literatur akan dianalisis dengan kedua teori ini untuk menilai relevansi dan efektivitasnya. Hasil analisis diharapkan memberikan kontribusi baik secara akademik (pengembangan teori strategi politik dan intelijen dalam konteks pascakonflik) maupun praktis (pembelajaran bagi partai politik lokal maupun nasional dalam mengelola strategi elektoral di daerah dengan sejarah konflik).

1.6.2. Kerangka Teori dan Konseptual

Sebagaimana dijelaskan pada bagian latar belakang, Partai Aceh merupakan partai lokal yang berdiri berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006, sedangkan DPRA adalah lembaga legislatif daerah Aceh yang jumlah kursinya berbeda dengan DPRD provinsi lain. Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada strategi PA dalam mendominasi kursi DPRA dengan menggunakan dua kerangka teori utama, sebagai berikut:

1.6.2.1. Teori Strategi Politik

Strategi politik adalah cara atau metode untuk mencapai tujuan politik. Setiap partai politik memerlukan strategi politik karena tanpa itu, perubahan jangka panjang sulit tercapai. Perencanaan strategi merupakan proses analisis tentang kondisi kekuasaan, dengan gambaran jelas mengenai tujuan akhir dan kekuasaan yang diperlukan untuk mencapainya (Schröder, 2003). Peter Schröder mengidentifikasi beberapa jenis strategi politik, yaitu:

1. Strategi Ofensif

Strategi ofensif (menyerang) biasanya diterapkan oleh partai yang ingin meningkatkan jumlah pemilih. Keberhasilan kampanye ditentukan oleh banyaknya orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai, lebih dari sebelumnya. Dalam kampanye pemilu, strategi ofensif harus mampu menunjukkan perbedaan yang jelas, menarik perhatian masyarakat, serta menarik dukungan dari pemilih partai pesaing.

Strategi ofensif dibagi menjadi dua jenis, yaitu strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar. Pertama, strategi perluasan pasar bertujuan untuk

membentuk basis pemilih baru sebagai cadangan, di samping basis pemilih tetap yang sudah ada. Dalam kampanye, strategi ini digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan keunggulan program serta calon yang akan maju dalam pemilihan umum.

Kedua, strategi menembus pasar bertujuan untuk menggali potensi maksimal dari kandidat yang sudah dipilih oleh partai. Potensi tersebut dapat dieksplorasi melalui kelebihan kandidat, seperti kemampuan berbicara di depan publik, berorganisasi, mengatur komunitas, dan lain-lain. Selain itu, eksplorasi juga dapat dilakukan dengan menargetkan pemilih yang sebelumnya berhasil didapatkan.

Menurut Schröder, kedua pola strategi ofensif tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Berusaha menunjukkan perbedaan yang jelas dan menarik dibandingkan dengan lawan politik yang ingin diambil alih pemilihnya.
- b) Menonjolkan keuntungan yang akan diterima masyarakat jika mendukung pihaknya.
- c) Menawarkan keunggulan yang dimiliki yang tidak ditemukan pada pihak pesaing.
- d) Berusaha menjadi penyempurna dari program-program pesaing.
- e) Menjanjikan perubahan.

2. Strategi *Defensif*

Strategi defensif diterapkan ketika partai berusaha mempertahankan dominasinya atau menjaga pangsa pasar agar tetap eksis dan tidak kehilangan pengaruh. Dengan kata lain, strategi ini digunakan untuk mempertahankan pasar, menutup, atau bahkan menyerahkan pasar. Dalam mempertahankan pasar, partai yang mendukung pemerintahan berusaha untuk menjaga agar pemilih tetap setia dan meyakinkan pemilih musiman sebelumnya untuk kembali memberikan suara.

Di sisi lain, strategi melepas atau menyerahkan pasar memiliki dua makna. Pertama, sebuah partai memilih untuk menyerah atau berkolaborasi dengan partai lain dalam kondisi tertentu. Meskipun hal ini jarang terjadi, kasus yang lebih sering dijumpai adalah saat pemilu menggunakan sistem kertas suara dan terdapat pemungutan suara putaran kedua, di mana hanya kandidat terkuat yang bertanding. Dalam hal ini, penyerahan pasar sementara kepada pihak ketiga sering kali terjadi. Strategi defensif dilaksanakan melalui berbagai langkah, antara lain:

- a) Menjaga dan memperkuat solidaritas pemilih tetap agar tidak mudah berpindah ke partai lawan.
- b) Memperkuat pemahaman pemilih terhadap program-program yang sebelumnya dianggap sukses.
- c) Melakukan operasi disinformasi untuk mengaburkan perbedaan dengan lawan politik.

3. Strategi *Positioning*

Newman dan Sheth (1985) menjelaskan mengenai strategi *positioning*, yang bertujuan untuk merebut dan mempertahankan pasar dengan memperhatikan citra kinerja suatu kontestan, baik itu partai politik maupun kandidat. Ada empat pilihan strategi yang dapat digunakan, yaitu:

a) Strategi Penguatan (*Reinforcement Strategy*)

Strategi ini diterapkan oleh kandidat yang sudah terpilih dan memiliki citra tertentu, yang dibuktikan melalui kinerja politik selama menjabat dalam posisi publik tertentu. Strategi ini juga digunakan oleh kontestan yang telah terpilih berdasarkan pembuktian janji politik mereka pada masa kampanye. Komunikasi difokuskan kepada pemilih yang sebelumnya memilih kontestan tersebut dengan pesan bahwa "pilihan anda dahulu sudah tepat, dan tetaplah memilih yang sama dalam pemilihan ini."

b) Strategi Rasionalisasi (*Rationalization Strategy*)

Strategi ini diambil ketika kelompok pemilih yang sebelumnya memilih kontestan tertentu berdasarkan citra yang mereka sukai, namun kemudian kinerja kontestan tersebut tidak sesuai dengan citra yang dibangun. Rasionalisasi diperlukan untuk menjaga citra di mata pemilih menjelang pilkada agar tidak mempengaruhi persepsi mereka.

c) Strategi Bujukan (*Inducement Strategy*)

Strategi ini diterapkan oleh kandidat yang memiliki citra tertentu, namun kinerjanya atau atribut-atributnya cocok dengan citra lain. Dengan kata lain,

strategi ini digunakan ketika citra seorang kandidat tidak sesuai dengan persepsi masyarakat meskipun kinerjanya sudah cukup baik di mata pemilih.

d) Strategi Konfrontasi (*Confrontation Strategy*)

Strategi ini digunakan terhadap pemilih yang sebelumnya memilih kontestan dengan citra tertentu, namun kemudian merasa citra tersebut tidak cocok dan kinerjanya tidak memuaskan. Kadang-kadang dalam pemilu, sebagian pemilih memilih kandidat dengan citra yang kurang baik, namun ternyata kandidat tersebut tidak memenuhi harapan kinerja mereka.

Dalam konteks Partai Aceh, teori ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana partai tersebut membentuk dan menyesuaikan strateginya dalam empat periode pemilu legislatif untuk mempertahankan dominasinya.

1.6.2.2. Teori Penggalangan Intelijen

Penggalangan merupakan suatu kegiatan atau metode yang digunakan untuk mempengaruhi target dengan tujuan mengubah Emosi, Sikap, Perilaku, Opini, dan Motivasi (ESTOM) target tersebut (Saronto, 2018). Tujuan dari penggalangan adalah untuk menciptakan kondisi tertentu yang terarah dan terukur, sehingga target dapat mengikuti keinginan penggalang.

Sukarno (2011) menjelaskan bahwa ada tiga strategi penggalangan yang perlu diterapkan agar rencana dapat berjalan lancar. Pertama, memenangkan hati dan pikiran target, kedua, mengarahkan target agar mengikuti arah yang diinginkan, dan ketiga, menciptakan situasi yang mendukung. Target penggalangan terbagi menjadi tiga kelompok: kelompok lawan yang menentang

tujuan penggalang, kelompok netral yang tidak mendukung maupun menentang, dan kelompok sekutu yang mendukung untuk menghindari pengaruh dari kelompok lawan.

Penggalangan intelijen yang dilakukan secara lunak menggunakan berbagai sarana, seperti persuasi untuk menanamkan pemahaman baru pada target (melalui dialog, silaturahmi, seminar, workshop), memberikan bantuan materi, serta melakukan kegiatan propaganda (Sukarno, 2011).

Menurut Saronto (2018), sarana penggalangan meliputi pola, teknik, dan taktik. Pola penggalangan merupakan arah yang dituju untuk membuat target mau mengikuti keinginan penggalang. Ada dua pola yang diterapkan: pola persuasif (bersifat membina, mendampingi, mengembangkan) dan pola koersif (bersifat memecah belah, melemahkan, dan mengadu domba sasaran).

Adikara, Zuhdi, dan Purwanto (2021) menjelaskan bahwa teknik penggalangan terbagi menjadi tiga, yaitu Perang Urat Syaraf (PUS), Propaganda, dan Sabotase. Perang Urat Syaraf (PUS) bertujuan mempengaruhi Emosi, Sikap, Tingkah laku, Opini, Motivasi (ESTOM) lawan. Propaganda adalah komunikasi yang dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi perilaku lawan. Sabotase bertujuan merusak dan menghancurkan sasaran seperti instalasi dan infrastruktur. Saronto (2018) juga menyebutkan teknik-teknik penggalangan lainnya, seperti gerakan menarik, menekan, memutar balik, memecah belah, dan mengadu domba.

Salah satu pendekatan dalam penggalangan intelijen adalah pendekatan RASCLS dan MICE (Penaflor, 2012). Pendekatan ini dipopulerkan oleh Cialdini

(2007) dan Burkett (2013). RASCLS dan MICE merupakan akronim dari *Reciprocity, Authority, Scarcity, Commitment, Liking, Social Proof*, serta *Money, Ideology, Coercion, Ego*. Burkett (2013) menekankan bahwa kunci utama dalam pendekatan RASCLS dan MICE adalah penguasaan motif dan psikologi lawan. Pendekatan ini lebih menekankan pada prinsip persuasif dan komunikasi langsung, karena yang dikendalikan adalah ESTOM lawan.

Ilustrasi konkret mengenai penerapan teori penggalangan intelijen dapat terlihat dalam strategi yang dilakukan Partai Aceh pada Pemilu 2009. Penelitian Barter (2011) mencatat bahwa PA menggunakan metode intimidasi terhadap pemilih, baik melalui ancaman langsung maupun tekanan sosial di tingkat desa. Tindakan ini sejalan dengan konsep perang urat saraf (PUS) dalam penggalangan, di mana tujuan utamanya adalah memengaruhi emosi dan rasa takut masyarakat sehingga mereka terdorong untuk memilih sesuai dengan kehendak partai.

Selanjutnya, International Crisis Group (2012) menegaskan bahwa intimidasi tersebut tidak hanya berlangsung pada masa kampanye, tetapi juga berlanjut hingga hari pemungutan suara. Hal ini menggambarkan pola penggalangan koersif, yang berupaya menekan lawan dan memecah keberanian kelompok pemilih netral.

Namun demikian, penelitian Ayunanda & Maimun (2018) memperlihatkan pergeseran strategi pada Pileg 2014. PA mulai mengadopsi pola penggalangan persuasif, misalnya dengan melibatkan masyarakat desa dalam proses seleksi calon legislatif serta menawarkan program Malem Dagang berbasis agama untuk

menarik dukungan ulama. Strategi ini mencerminkan penggunaan teknik persuasi dan propaganda yang lebih halus, sejalan dengan prinsip liking dan commitment dalam pendekatan RASCLS–MICE (Cialdini, 2007; Burkett, 2013).

Dengan demikian, fenomena lapangan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu membuktikan bahwa teori penggalangan intelijen bukan hanya kerangka abstrak, tetapi nyata diaplikasikan oleh Partai Aceh, baik melalui pola koersif di awal perjalanan politiknya maupun pola persuasif pada periode berikutnya. Perubahan ini menunjukkan fleksibilitas strategi PA dalam memadukan taktik politik formal dengan metode penggalangan yang lazim digunakan dalam operasi intelijen.

Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam konteks Aceh, mengingat kuatnya hubungan emosional antara eks-kombatan dan masyarakat, serta penggunaan narasi simbolik dan sejarah perjuangan sebagai alat pengaruh.

1.6.2.3. Konseptualisasi Strategi Dominasi

Dominasi dalam politik tidak hanya dipahami sebagai kemenangan kuantitatif dalam pemilu, tetapi juga sebagai kemampuan suatu pihak untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan secara sah dan berulang. Menurut Weber (1978, p. 121), dominasi merupakan bentuk kekuasaan yang dijalankan atas dasar legitimasi, yaitu ketika perintah dari pihak yang berkuasa dipatuhi secara sukarela oleh pihak yang dikuasai karena dianggap sah. Artinya, dominasi tidak sekadar mengandalkan kekuatan koersif, tetapi juga membutuhkan dasar legitimasi yang diterima masyarakat.

Sunarto (2004, p. 74) menambahkan bahwa legitimasi merupakan elemen penting dalam mempertahankan dominasi politik. Tanpa legitimasi, dominasi berisiko menimbulkan perlawanan dan kehilangan daya tahan. Dengan legitimasi, dominasi dapat berlangsung lebih stabil karena didukung oleh kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat.

Dalam konteks partai politik, Budiardjo (2008, p. 404) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya melalui persaingan elektoral. Oleh karena itu, dominasi partai politik di lembaga legislatif tidak hanya merefleksikan hasil pemilu, tetapi juga strategi berkelanjutan untuk menjaga dukungan publik, mengelola simbol, serta memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan kultural.

Dalam penelitian ini, dominasi politik hibrida dipahami sebagai dominasi yang dibentuk oleh perpaduan strategi elektoral formal dan pengaruh sosial-psikologis pascakonflik. Strategi elektoral formal mencakup ofensif, defensif, dan positioning, sedangkan pengaruh sosial-psikologis bekerja melalui penggalangan persuasif dan koersif. Dengan demikian, dominasi Partai Aceh tidak hanya dibaca sebagai kemenangan kursi, tetapi juga sebagai hasil dari legitimasi historis, simbol perjuangan, jaringan eks-GAM/KPA, loyalitas grassroot, memori konflik, dan adaptasi terhadap perubahan perilaku pemilih.

Dengan mengacu pada kerangka konseptual tersebut, dominasi Partai Aceh (PA) atas kursi DPRA dapat dipahami bukan sekadar karena jumlah kursi terbanyak yang diraih sejak Pemilu 2009, melainkan juga karena kemampuannya

membangun legitimasi di mata masyarakat Aceh pascakonflik. Hal ini dilakukan melalui simbol perjuangan eks-GAM, pengelolaan isu identitas, serta adaptasi strategi politik dan penggalangan yang membuat PA mampu mempertahankan kontrol politik di tingkat provinsi selama empat edisi pemilu.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini, jenis penelitian yang tepat adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1992) yang dikutip oleh Rahmat (2009), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan, tulisan, atau hasil pengamatan terhadap perilaku orang lain. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi dengan tepat sifat-sifat, kondisi, dan fenomena baik pada individu maupun kelompok tertentu, sehingga dapat dipahami tindakan yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) serta menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian kualitatif menggunakan instrumen pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan tersebut (Bachri, 2010).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berupaya menggambarkan dan menganalisis secara mendalam strategi Partai Aceh sebagai partai eks-kombatan GAM dalam mempertahankan

dominasi perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada empat edisi Pemilu, yaitu 2009, 2014, 2019, dan 2024. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan demikian, metode deskriptif kualitatif relevan digunakan dalam penelitian ini karena data yang dikaji berupa pandangan informan, dinamika politik lokal, strategi politik, teknik pengaruh, serta pola pergeseran strategi Partai Aceh dalam konteks politik Aceh pascaperdamaian.

Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap persoalan sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami pengalaman, pandangan, dan penilaian informan terhadap dominasi Partai Aceh, baik dari perspektif internal partai, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, akademisi, partai lokal pembanding, maupun unsur intelijen daerah.

Selanjutnya, data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif mencakup tahapan *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Melalui tahapan tersebut, data wawancara dan dokumen

dalam penelitian ini dapat dipilah, dikelompokkan, disajikan, dan ditafsirkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai strategi dominasi Partai Aceh dalam empat edisi Pemilu DPRA.

1.7.2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh berasal langsung dari hasil pengamatan di objek penelitian melalui wawancara langsung. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan tanggapan dari informan. Data tersebut didapat dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengumpulan data bersifat kualitatif, mencakup informasi yang berkaitan dengan strategi partai politik serta strategi penggalangan untuk perolehan suara Partai Aceh. Data ini dikumpulkan melalui jawaban informan yang diperoleh dari wawancara langsung.

b. Data Sekunder

Jenis data ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui berbagai literatur, seperti jurnal, penelitian sebelumnya, majalah, dokumen, serta sumber lain yang relevan dengan strategi partai politik dan strategi penggalangan dalam memperoleh suara untuk Partai Aceh. Data ini digunakan untuk menyusun penelitian ini, baik yang berasal dari buku-buku maupun dokumen terkait.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang

kemudian dijawab secara lisan juga. Ciri utama wawancara adalah adanya interaksi langsung antara pewawancara dan Informan secara tatap muka. Proses ini dilakukan dengan wawancara langsung bersama Pimpinan Partai Aceh atau Anggota Legislatif Terpilih yang memenuhi kriteria untuk dijadikan informan, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (metode penelitian pustaka) adalah penelitian yang dilakukan melalui buku-buku dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Turere, 2013). Proses ini melibatkan studi berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, yang berguna untuk memperoleh dasar teori terkait masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep yang akan dikaji, serta mencari literatur, bahan pustaka, dokumen, dan artikel yang berkaitan dengan judul dan objek penelitian.

1.7.4. Informan

Informan merupakan individu yang memberikan data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian, berdasarkan pengalaman pribadi, pengetahuan atau keterlibatannya dalam suatu fenomena sosial atau politik yang dianggap memiliki informasi luas dan mendalam berkaitan dengan konteks yang diteliti (Creswell, 2014). Sementara itu, dalam Silverman (2016), Informan dalam penelitian kualitatif adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi langsung mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti. Mereka biasanya dipilih

berdasarkan kriteria tertentu, seperti keahlian, posisi sosial, atau keterlibatan mereka dalam peristiwa yang menjadi fokus penelitian.

Terdapat beberapa jenis informan yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam atau akses khusus terhadap topik atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks politik, informan kunci umumnya adalah orang-orang yang memiliki pengalaman langsung atau pemahaman mendalam mengenai sistem politik, kebijakan, atau peristiwa politik yang diteliti. Mereka sering dipilih karena otoritas atau peran mereka dalam suatu organisasi atau gerakan politik (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, informan kunci berasal dari unsur pimpinan DPRA dari Fraksi Partai Aceh. Unsur ini dipilih karena memiliki posisi strategis dalam lembaga legislatif Aceh, memahami dinamika politik lokal, serta memiliki kapasitas untuk menjelaskan strategi, arah kebijakan, basis dukungan, jaringan eks-kombatan GAM/KPA, dan dominasi Partai Aceh dalam perolehan kursi DPRA pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024.

b. Informan Partisan

Informan partisipan adalah individu yang terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Mereka bisa berasal dari kelompok masyarakat, aktivis, atau warga yang memiliki pengalaman atau peran aktif dalam sebuah gerakan sosial atau politik. Informan jenis ini memberikan pandangan berdasarkan

pengalaman pribadi mengenai dinamika sosial-politik yang terjadi di lapangan (Silverman, 2016). Informan partisan dalam penelitian ini berasal dari unsur kader Partai Aceh yang berada di lembaga legislatif Aceh. Unsur ini dipilih karena memiliki afiliasi langsung dengan Partai Aceh dan dapat memberikan perspektif internal mengenai konsolidasi partai, loyalitas basis massa, strategi elektoral, penggunaan simbol perjuangan, hubungan dengan jaringan eks-kombatan GAM/KPA, serta perubahan pola strategi Partai Aceh dari satu periode pemilu ke periode berikutnya.

c. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah individu yang dapat memberikan wawasan tentang basis dukungan mereka. Dalam penelitian kualitatif politik, penting untuk memahami motivasi dan alasan di balik dukungan mereka, karena hal ini dapat memberikan informasi berharga mengenai dinamika politik dan preferensi pemilih (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, informan pendukung berasal dari unsur penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, akademisi, serta institusi negara yang memahami dinamika politik dan keamanan di Aceh. Unsur tersebut meliputi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai penyelenggara pemilu, Panwaslih/Bawaslu Aceh sebagai pengawas pemilu, akademisi dari perguruan tinggi yang memahami politik lokal Aceh, serta unsur Intelijen Negara yang memiliki pemahaman mengenai stabilitas keamanan, dinamika sosial-politik, dan perkembangan politik Aceh pascakonflik.

d. Informan Oposisi

Informan oposisi adalah individu atau kelompok yang menentang kebijakan, ideologi, atau partai politik tertentu. Dalam konteks penelitian politik, mereka memberikan perspektif yang berbeda dan sering kali dapat memberikan wawasan penting mengenai kekuatan yang berlawanan, ketidakpuasan, atau protes terhadap kebijakan atau kekuasaan yang sedang berlangsung (Kirk & Miller, 1986). Dalam penelitian ini, informan oposisi berasal dari unsur pengurus partai politik lokal di luar Partai Aceh, khususnya Partai Nanggroe Aceh (PNA). Unsur ini dipilih karena memiliki posisi sebagai partai lokal pembanding sekaligus kompetitor Partai Aceh dalam politik lokal Aceh, serta dapat memberikan pandangan kritis mengenai dominasi Partai Aceh, fragmentasi politik eks-GAM, persaingan antarpartai lokal, dan tantangan demokrasi lokal di Aceh.

1.7.5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang menjadi pusat aktivitas politik, pemerintahan, dan pengambilan keputusan strategis. Lokasi ini dipilih karena di Banda Aceh beroperasi lembaga-lembaga kunci yang memiliki kaitan langsung dengan strategi dan dominasi Partai Aceh, seperti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, serta instansi terkait lainnya.

Selain itu, Kota Banda Aceh juga berfungsi sebagai arena utama bagi Partai Aceh dalam mengonsolidasikan kekuatan politik dan menampilkan

legitimasi di hadapan publik. Karena itu, penelitian di Banda Aceh dapat merepresentasikan dinamika politik provinsi secara lebih luas.

Waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, dengan tahapan meliputi persiapan, pengumpulan data lapangan, dan analisis awal hasil wawancara serta dokumen yang diperoleh.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini melibatkan empat komponen analisis, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004, pp. 280-281), "Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data." Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992, pp. 15-19) adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan di lokasi penelitian melalui wawancara dan kajian kepustakaan. Strategi pengumpulan data yang dipilih dianggap tepat untuk menentukan fokus dan memperdalam data pada tahap pengumpulan data berikutnya.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah langkah mendeskripsikan informasi yang telah tersusun, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi teks. Penyajian data juga bisa menggunakan matrik, diagram, tabel, dan bagan.

c. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses seleksi dan penyederhanaan data mentah yang berasal dari catatan lapangan. Proses ini dimulai sejak pengumpulan data, yang melibatkan pembuatan ringkasan, pengkodean, pencarian tema, pembuatan kelompok, dan penulisan memo untuk menghapus data yang tidak relevan.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Ini adalah tahap akhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi data yang telah disajikan untuk menemukan makna yang terkandung. Di antara penyajian data dan penarikan kesimpulan, terdapat aktivitas analisis data yang berlangsung.

Selanjutnya, data yang telah dianalisis dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk narasi untuk mendeskripsikan fakta di lapangan, memberikan pemaknaan, atau menjawab pertanyaan penelitian, yang kemudian disarikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, setiap tahap dalam proses ini bertujuan untuk memastikan validitas data dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto, melalui wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

1.7.7. Keabsahan Data

Menurut Zuldafrial (2012, p. 89), "keabsahan data merujuk pada konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) yang dalam penelitian kuantitatif

disesuaikan dengan kriteria dan paradigma penelitian tersebut." Keabsahan data adalah tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Lincoln dan Guba (1985) dalam Wijaya (2018) menyatakan bahwa keabsahan data dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan kompleks, sehingga tidak ada yang tetap dan berulang seperti sebelumnya. Keabsahan data dapat diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi data dalam proses pengumpulan data.

Sugiyono (2015, p. 83) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah tersedia. Wijaya (2018, pp. 120-121) juga menyatakan bahwa triangulasi data adalah teknik untuk memeriksa data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu yang berbeda. Terdapat beberapa jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, arsip, atau dokumen lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memverifikasi data yang diperoleh dari sumber yang sama, namun menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui observasi kemudian diverifikasi melalui wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang diperoleh melalui wawancara pada pagi hari ketika informan masih segar cenderung lebih valid. Oleh karena itu, untuk menguji kredibilitas data, pengecekan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada waktu atau dalam situasi yang berbeda hingga mendapatkan data yang kredibel.

1.7.8. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian. Langkah-langkah prosedur penelitian yang umum digunakan meliputi tiga tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pra-Lapangan

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan etika penelitian lapangan. Tahap ini mencakup pembuatan rancangan proposal penelitian, serta pengumpulan, penyajian, dan reduksi data, hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk penelitian. Pada tahap ini, peneliti diharapkan dapat memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri dengan matang sebelum melakukan penelitian di lapangan.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan diri untuk menggali dan mengumpulkan data yang akan digunakan untuk analisis. Setelah data terkumpul,

langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti telah mengolah data yang telah diperoleh dari informan maupun dokumen. Data tersebut akan disusun dan dianalisis untuk menghasilkan temuan yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan sementara sebelum ditulis dalam bentuk keputusan akhir.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam empat bab utama yang saling berkaitan dan membentuk alur logis dari keseluruhan proses penelitian. Setiap bab memiliki fungsi spesifik dalam menjelaskan tahapan kajian ilmiah yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari perumusan masalah, penyajian konteks penelitian, temuan dan analisis, hingga penarikan simpulan akhir.

Bab I berisi Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan tesis. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami konteks, arah, fokus, serta kerangka berpikir penelitian.

Bab II menjelaskan Setting Penelitian, yang mencakup gambaran umum mengenai konteks historis dan politik Aceh pascaperdamaian, karakteristik lokasi penelitian, profil Partai Aceh, dinamika pemilu legislatif DPRA, serta karakteristik informan penelitian. Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman

mengenai latar empiris yang melandasi dominasi Partai Aceh, sehingga pembaca dapat mengaitkan konteks politik lokal Aceh dengan kerangka teori dan fokus penelitian yang digunakan.

Bab III menguraikan Temuan dan Analisis Strategi Dominasi Partai Aceh dalam Pemilu DPRA 2009–2024. Bab ini menyajikan temuan penelitian yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, data pemilu, serta literatur pendukung, kemudian dianalisis berdasarkan kategori atau tema yang sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka teori. Fokus utama bab ini adalah menjelaskan pola dominasi elektoral Partai Aceh, strategi politik formal, pemanfaatan modal historis dan simbolik eks-GAM, jaringan eks-kombatan/KPA dan akar rumput, teknik pengaruh dan penggalangan politik, dimensi koersif pada fase awal, serta pergeseran strategi Partai Aceh menuju pola yang lebih persuasif dan hibrida. Dengan demikian, Bab III tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menjadi ruang analisis untuk membaca strategi dominasi Partai Aceh melalui teori strategi politik dan teori penggalangan intelijen.

Bab IV merupakan Penutup yang berisi simpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, serta saran/rekomendasi. Simpulan disusun sebagai sintesis dari hasil temuan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Implikasi penelitian diarahkan pada pengembangan kajian partai politik lokal, politik pascakonflik, dan penggunaan perspektif penggalangan intelijen dalam studi politik. Sementara itu, saran/rekomendasi ditujukan bagi penelitian selanjutnya,

partai politik lokal, penyelenggara pemilu, pemerintah, serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan dinamika politik lokal Aceh.